



WAWALI YOGYA JAMIN PELAYANAN RS JOGJA TAK TERGANGGU

Optimis Klaim BPJS Rp 16 M

Segera Dibayar

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta menjamin RS Jogja tetap memberikan pelayanan ke masyarakat dengan dukungan anggaran. Meskipun belum ada kepastian tunggakan BPJS dibayarkan, pihaknya optimis persoalan itu bisa diselesaikan.

"Kami dan DPRD sudah sepakat menyiapkan anggaran terkait RS Jogja. Apapun keputusannya, Pemkot Yogya siap membantu dan akan membuat RS Jogja tidak ada masalah," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Senin (5/8).

Dia menyatakan dengan dukungan APBD, operasional pelayanan di RS Jogja tidak terganggu. Mulai dari pemeriksaan hingga ketersediaan obat dan layanan lainnya. Oleh sebab itu dia berharap masyarakat tidak ragu mengakses layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkot Yogya tersebut.

Pihaknya optimis persoalan tunggakan klaim BPJS senilai Rp 16 miliar ke RS Jogja bisa diselesaikan. Dia berkaca pada tahun lalu tunggakan BPJS Kesehatan di RS Jogja mencapai Rp 36 miliar bisa diselesaikan. "Saya kira sekarang dengan tunggakan Rp 16 miliar juga bisa diselesaikan," ujarnya.

Dia juga berharap persoalan tunggakan BPJS Kesehatan dan RS Jogja segera mencapai kesepakatan untuk memperhitungkan kebutuhan anggaran. Terkait aturan rumah sakit harus terakreditasi untuk pencairan klaim BPJS Kesehatan, dia menilai semua pihak harus melihat kenyataan di lapangan. Terutama keberadaan RS Jogja sebagai rumah sakit tipe B regional yang tak hanya melayani warga kota, tapi juga rujukan warga selatan Yogyakarta.

"Kami harap semua melihat kenyataan di lapangan terkait keberadaan RS Jogja. Kami membantu anggaran untuk bisa memberikan pelayanan ke siapa saja," tambah Heroe.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa menyebut dalam APBD Perubahan 2019 dialokasikan tambahan Rp 6 miliar untuk pos anggaran belanja langsung RSUD Jogja. Pada APBD murni 2019 telah dianggarkan Rp 5,7 miliar bagi RS Jogja.

Seperti diketahui BPJS Kesehatan belum membayar klaim Rp 16 miliar untuk bulan April-Maret 2019 ke RS Jogja karena kendala akreditasi rumah sakit itu. Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Dwi Hesti Yuniarti menyampaikan akreditasi merupakan syarat mutlak bagi fasilitas kesehatan untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga klaim belum bisa diterima. Namun demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS Jogja untuk membahas hal tersebut.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. RSUD (RS Jogja)	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005